

**“PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ANGGARAN
DESA TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN DESA (Studi pada Desa di Kabupaten Lampung
Selatan)”**

TUGAS INDIVIDU

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah
Metode Penelitian Administrasi Publik**



Oleh :

Zaskia Febriyanti_2466041003

Mandiri B

Dosen Pengampu :

Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2025

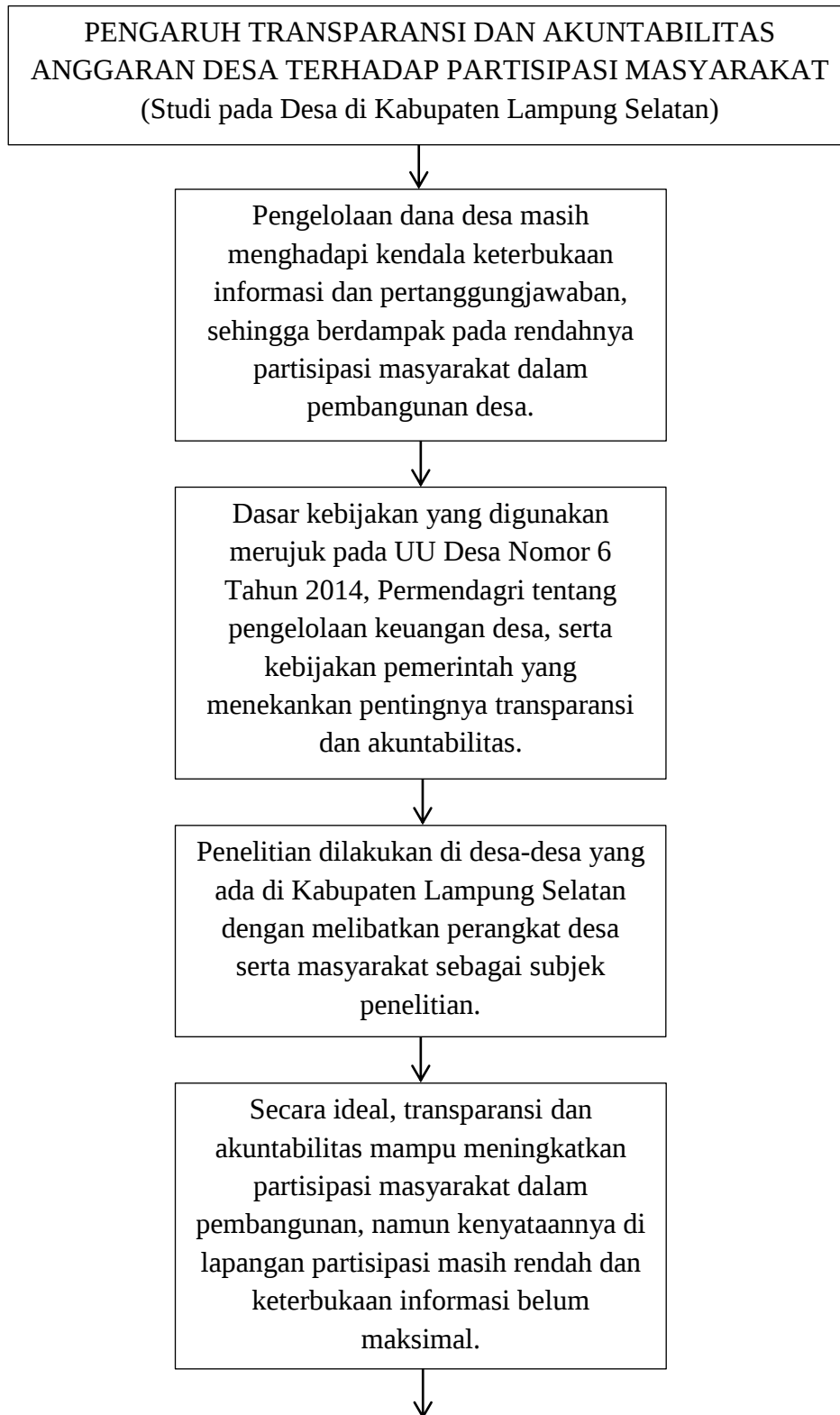
2.3 Kerangka Berpikir

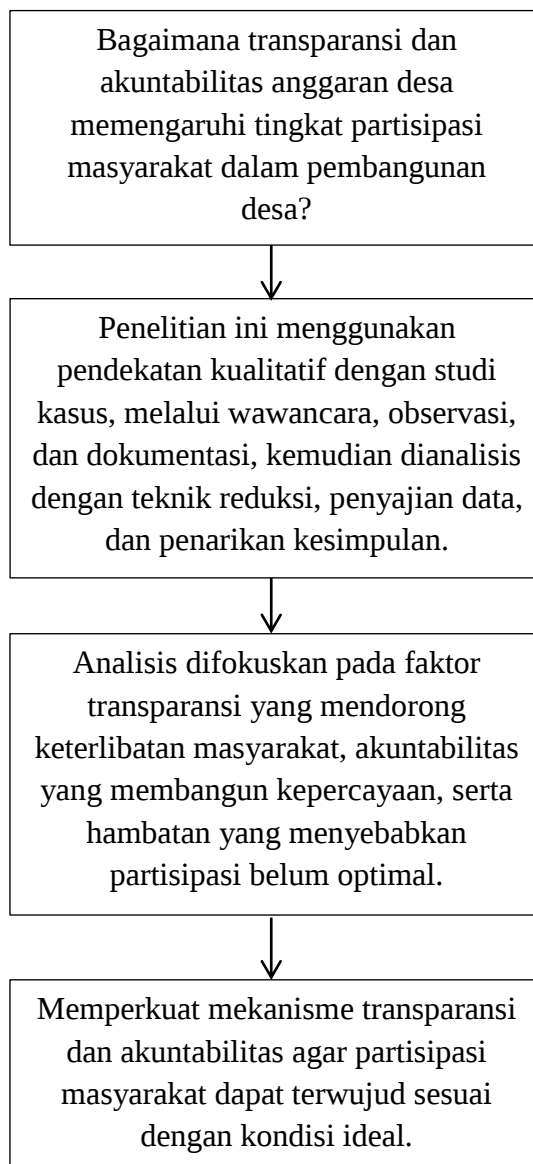
Kerangka berpikir merupakan fondasi utama dalam penelitian ilmiah karena berfungsi untuk menyusun alur logis antara masalah, teori, dan tujuan penelitian. Dalam konteks kajian mengenai transparansi dan akuntabilitas anggaran desa terhadap partisipasi masyarakat, kerangka berpikir dibangun berdasarkan konsep *good governance* yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban publik (Sedarmayanti, 2013). Dengan demikian, kerangka berpikir menjadi peta konseptual yang menuntun penelitian sesuai realitas empiris dan memberi gambaran arah analisis serta hasil yang diharapkan.

Permasalahan yang menjadi titik awal penelitian adalah adanya kesenjangan antara kondisi ideal menurut teori dengan kenyataan di lapangan. Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa meskipun aturan dan kebijakan tentang pengelolaan keuangan desa sudah tersedia, partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum berjalan optimal. Hal ini memperlihatkan adanya jurang antara regulasi yang mengatur transparansi dan akuntabilitas dengan penerapan di tingkat desa. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana transparansi dan akuntabilitas mampu meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan desa, serta apa saja faktor penghambat yang membuat partisipasi tidak berkembang secara maksimal (Siagian, 2016).

Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian diarahkan untuk memahami lebih mendalam fenomena di lapangan, terutama interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat. Metode ini memungkinkan peneliti menggali pengalaman, persepsi, dan hambatan yang dialami masyarakat dalam berpartisipasi, sehingga kesenjangan antara kondisi ideal dan kenyataan dapat dijelaskan secara komprehensif. Pendekatan ini dipilih karena mampu menghasilkan deskripsi yang lebih kaya mengenai realitas sosial, termasuk bagaimana regulasi diterjemahkan dalam praktik, bagaimana transparansi dijalankan, serta bagaimana akuntabilitas dipersepsikan oleh masyarakat desa (Rahman & Permatasari, 2021).

Berdasarkan analisis diatas, maka kerangka konsep penelitian ini, yaitu :





Gambar 2.3

Kerangka Berpikir

Berdasarkan gambar bagan 2.3, penelitian dimulai dari masalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa meski regulasi mengamanatkan transparansi dan akuntabilitas. Hubungan teori dan kenyataan menjadi dasar merumuskan pertanyaan tentang pengaruh transparansi dan akuntabilitas anggaran desa terhadap keterlibatan masyarakat. Fokus kajian tidak hanya pada kebijakan, tetapi juga tata kelola anggaran desa yang dirasakan masyarakat.

Keterkaitan antara regulasi, kondisi ideal, dan kenyataan empiris di lapangan memperlihatkan bahwa penelitian ini berangkat dari gap nyata yang dialami masyarakat desa. Hal tersebut menuntut adanya pemahaman mendalam tentang bagaimana peran pemerintah desa dalam menjalankan fungsi transparansi dan akuntabilitas benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kerangka berpikir yang dibangun berangkat dari perbandingan antara kondisi normatif yang diatur regulasi dan kondisi empiris yang terjadi di lapangan, sehingga mampu menjelaskan perbedaan keduanya secara lebih jelas, terukur, dan menyeluruh.

Melalui metode kualitatif, peneliti menggali lebih dalam dinamika interaksi pemerintah desa dan warga, sehingga tidak hanya memahami aturan tertulis, tetapi juga menelaah praktik, hambatan, dan peluang yang muncul dalam pelaksanaannya. Analisis ini diharapkan menemukan pola partisipasi masyarakat yang dipengaruhi keterbukaan informasi dan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa, serta memberi pemahaman lebih luas mengenai penerapan prinsip good governance dalam praktik desa. Dengan cara ini, penelitian mampu memberi gambaran yang lebih realistis tentang efektivitas tata kelola desa sekaligus memperlihatkan aspek mana saja yang perlu ditingkatkan (Dwiyanto, 2018).

Dengan demikian, kerangka berpikir ini tidak hanya menjadi peta konseptual penelitian, tetapi juga dasar untuk menyusun analisis yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian diharapkan mampu memperkuat penerapan transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat terdorong untuk berpartisipasi lebih aktif dalam setiap tahapan pembangunan desa. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya kajian administrasi publik sekaligus menawarkan solusi praktis yang dapat segera diimplementasikan pemerintah desa. Harapannya, pemerintah desa mampu membangun kepercayaan masyarakat, memperkuat hubungan kolaboratif, dan mempercepat pencapaian pembangunan desa (Ringo, 2024).

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, A. (2018). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rahman, A., & Permatasari, A. A. (2021). Pengaruh Kompetensi Sdm Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 14–22.
- Ringo, D. S. (2024). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Pengelolaan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang*. Universitas Medan Area.
- Sedarmayanti. (2013). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Siagian, S. P. (2016). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.